

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**



## **DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

**KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Rasa Syukur Yang Ikhlas kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Izin, Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini serta proyeksi 5 (lima) tahun mendatang (2025 – 2029), yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Pertanian.

Kami menyadari bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan akan memberikan dampak perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga untuk kesempurnaan Renstra ini senantiasa dibutuhkan perbaikan-perbaikan yang lebih konstruktif sebagai upaya mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2029 di bidang pertanian.

Pelaihari,      Februari 2025  
Kepala Dinas



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I     PENDAHULUAN	1
1.1   Latar Belakang	2
1.2   Landasan Hukum	3
1.3   Maksud dan Tujuan	5
1.4   Sistematika Penulisan	6
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1   Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	7
2.1.2   Struktur dan bagan Organisasi	8
2.1.3   Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.4   Kelompok Sasaran Layanan	19
2.2   Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1   Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	30
3.1.1   Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	30
3.1.2   Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	30
3.2   Tujuan Renstra 2025-2029	30
BAB IV    PROGAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN	36
4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
BAB V    PENUTUP	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) menyatakan setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkeadilan serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Bupati Tanah Laut yang memuat tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah , serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu empat tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 – 2029.

Dalam penyusunan Rencana strategis Pembangunan Daerah (Renstra PD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 memperhatikan : (1.) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2029; (2). Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004 – 2026 ; (3) Isu-isu strategis yang berkembang ; (4) Kebijakan Nasional dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 -2029 disusun sebagai acuan / pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan. Dokumen ini lebih visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan dibidang pertanian yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan perencanaan dokumen lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam dan lintas pasal 1 ayat 1 & 2 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi, pengorganisasian dan pengukuran hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 4 (empat) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan. Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 4 (empat) tahun mendatang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025–2029 , peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/400/II.03.03/TW.III tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
  17. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. Permendagri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023;
  21. Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan adalah :memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Bidang Pertanian di Kabupaten Tanah Laut secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten sebagai gambaran tujuan , sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang pertanian, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tahunan selama tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Tersusunnya rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun ke depan 2025 – 2029.
2. Menentukan arah pembangunan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian periode 2025-2029.
3. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
4. Mewujudkan penjabaran Visi dan Misi yang diemban pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029.
5. Tersedianya program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang lebih terarah dan partisipatif sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat petani dan pelaku pertanian lainnya.
6. Terselenggaranya pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.



7. Menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunnya. Dan sebagai pedoman bagi setiap bidang dalam menyusun dan mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap maupun berkesinambungan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 terdiri dari 5 (lima) Bab yang dapat dirinci sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG PERTANIAN**
- BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, diantaranya meliputi sebuah gedung kantor dengan luas tanah 38.364 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Datu Insad Nomor 77 Pelaihari Telepon 0512-21008 serta sarana dan prasarana perkantoran lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

#### **1. Tugas Pokok**

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diberikan kepada daerah.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPTD Dinas, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

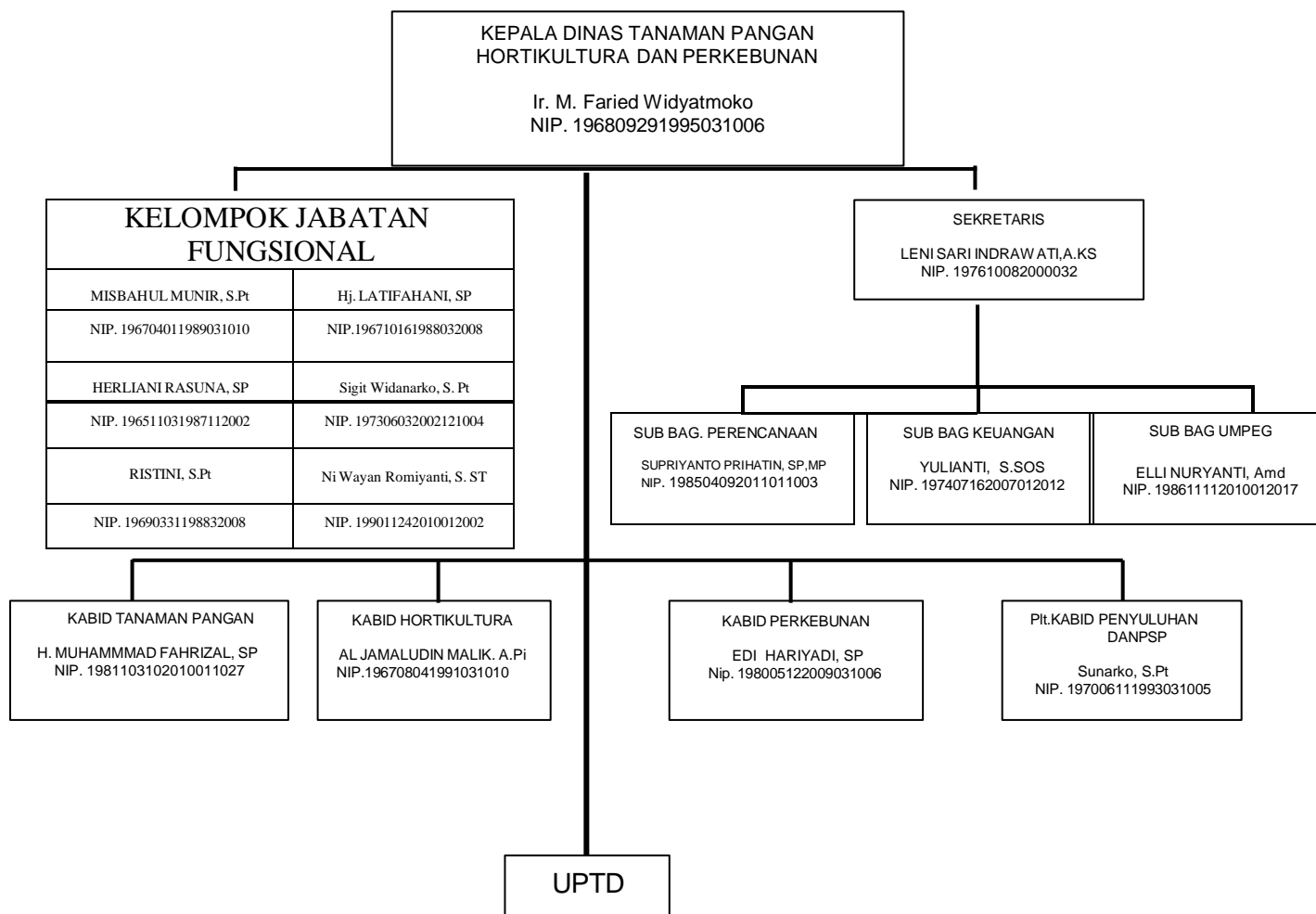
## **A. Struktur Organisasi**

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sekretaris
  - 2) Sub Bagian Perencanaan
  - 3) Sub Bagian Keuangan
  - 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
  - 1) Pengawas Benih Tanaman Muda
  - 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
  - 3) Analis Pasar Hasil Pertanian Muda.
- d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
  - 1) Pengawas Benih Tanaman Muda
  - 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
  - 3) Analis Pasar Hasil Pertanian Muda.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  - 1) Pengawas Benih Tanaman Muda
  - 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
  - 3) Analis Pasar Hasil Pertanian Muda.
- f. Bidang Penyuluh dan PSP, terdiri dari :
  - 1) Penyuluh Pertanian Muda
  - 2) Analis Ketahanan Pangan Muda; dan
  - 3) Analis Ketahanan Pangan Muda
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



BPP Kec. Pelaihari, BPP Kec. Takisung, BPP Kec Panyipatan BPP Kec Bajuin, BPP Kec. Bt Ampar, BPP Kec. Jorong, BPP Kec Kintap, BPP Kec. Tb Ulang, BPP Kec Bati—Bati, BPP Kec. Kurau, BPP Kec Bumi Makmur

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut mempunyai aparatur/ pegawai/ tenaga fungsional pegawai tidak tetap dengan latar belakang pendidikan dan tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dengan nama kantor masing-masing Kecamatan yaitu UPT Balai Penyuluhan Pertanian BPP dan UPT Balai Alsintan, untuk mengetahui jumlah pegawai tahun 2025 dan kebutuhan jumlah pegawai dari tahun 2025 s/d 2029 akan disajikan daftar table sebagai berikut :

Tabel 2.1.1  
Komposisi Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris Dinas	1 orang
3	Kepala Bidang	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	3 orang
5	Kepala BPP	11 orang
6	Kepala UPT Alsintan	1 orang
7	Kasubag TU UPT Alsintan	1 orang
8	Jabatan Fungsional Muda	12 orang
9	Jabatan Fungsional Madya	6 orang
10	Staf	9 orang
11	P3K	17 orang
12	Non PNS	47 orang

Tabel 2.1.2  
Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah		
	ASN	P3K	PTT
S2	1	-	-
S1	94	14	15
DIII	8	1	8
SLTA	14	1	22
SMP	-	-	3
SD	1		1
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>	<b>16</b>	<b>49</b>

Tabel 2.1.3  
Berdasarkan Golongan

Golongan	ASN
I	1
II	5
III	81
IV	31
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>

Tabel 2.1.4  
Berdasarkan Eselon

Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1	4	3

Tabel 2.1.5  
Proyeksi Kebutuhan  
Pegawai Berdasarkan  
Pendidikan

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahunan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	0	1	0	1	0	0	0	0
Perencana	0	2	0	0	2	0	0	0
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	3	0	1	0	0	0	0
Pengelola Layanan Operasional	0	4	0	2	2	0	0	0
Analisis Pasar Hasil Pertanian	2	3	0	1	0	0	0	0
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	0	1	0	1	0	0	0	0
Penelaah Teknis Kebijakan	1	7	0	2	5	0	0	0
Pengolah Data dan Informasi	1	7	0	3	4	0	0	0
Pengadministrasi Perkantoran	2	7	0	3	2	0	0	0
Operator Layanan Operasional	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selain dukungan sumber daya manusia juga sangat perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

ketersediaan sarana dan prasarana sangat membantu untuk membuat dan menyajikan laporan kegiatan dalam bentuk on line ataupun penyampaian data base lainnya dengan tepat waktu dan sasaran. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2.1.6  
Keadaan Sarana Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Traktor Lainnya	5
2	Exavator	1
3	Portable Generating Set	1
4	Pompa Air	70
5	Selang Air	4
6	Station Wagon	2
7	Mini Bus	1
8	Pick Up	3
9	Sepeda Motor	100
10	Mesin Bubut	1
11	Mesin Gerinda	2
12	Mesin Kompresor	2
13	Mesin Pemotong Plat	1
14	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1
15	Peralatan Las Listrik	3
16	Peralatan Las Karbit	1
17	Perkakas Bengkel Service Lainnya	2
18	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	3
19	Gunting Kain	1
20	PH Meter	4
21	GPS	25
22	Moisteur Meter	4
23	Alat Ukur Universal Lainnya	1
24	Alat Ukur Kadar Air	2
25	Alat Ukur Lain-Lainnya	10
26	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	2
27	Tractor Four Wheel	31
28	Traktor Tangan Dengan Pereengkapannya	169
29	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya	3
30	Semprotan Mesin	14
31	Semprotan Tangan	102
32	Alat Pemeliharaan Tanaman/ikan/ ternak Lainnya	5

33	Alat Perontok Mesin	40
34	Alat Pengering	9
35	Alat Pengukur Kadar Air	9
36	Alat Panen Lainnya	95
37	Lemari Penyimpan	1
38	Alat Pengukur Curah Hujan	1
39	Alat Pengukur P.H Tanah	2
40	Alat Laboratorium Lainnya	43
41	Unit Pengaduk	4
42	Alat Pembuat Pelet	2
43	Alat Prosesing Lainnya	12
44	Alat Pasca Panen Lainnya	21
45	Alat Pengolahan Lainnya	1
46	Mesin Ketik Manual Portabel	16
47	Mesin Ketik Listrik	11
48	Lemari Besi/Metal	49
49	Lemari Kayu	14
50	Rak Besi	15
51	Rak Kayu	2
52	Filing Cabinet Besi	17
53	Brankas	2
54	Lemari Sorok	1
55	Lemari Kaca	14
56	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	5
57	CCTV	1
58	Peta	1
59	Alat Pemotong Kertas	1
60	Mesin Laminating	1
61	LCD Projector	23
62	Focusing Screen/Layar LCD	5
63	Papan Nama Instansi	11
64	Papan Pengumuman	1
65	Alat Kantor Lainnya	1
66	Meja Kerja Besi	1
67	Meja Kerja Kayu	177
68	Meja Rapat	92
69	Kursi Rapat	254
70	Kursi Tamu	18
71	Kursi Putar	40
72	Kursi Biasa	146
73	Kursi Lipat	72
74	Meja Komputer	15
75	sofa	1



76	Meuble Lainnya	1
77	Mesin Potong Rumput	11
78	Alat Pembersih Lainnya	7
79	Lemari Es	6
80	A.C Split	53
81	Kipas Angin	5
82	Alat Pendingin Lainnya	1
83	Kompas Gas	2
84	Rice Warmer	32
85	Blender	1
86	Alat dapur Lainnya	3
87	Televisi	9
88	Loudspeaker	17
89	Sound System	34
90	Unit Power Supply	3
91	Stabilisator	3
92	Dispenser	7
93	Mimbar Podium	1
94	Handy Cam	1
95	Gordylin	2
96	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	12
97	Alat Pemadam/Portble	1
98	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	28
99	Kursi Pejabat Lainnya	4
100	Audio Mixing Stationer	2
101	Microphone/Wireless MIC	21
102	Microphone/Boom Stand	2
103	peralatan studio audio lainnya	37
104	Camera Electronic	40
105	Tripod Kamera	1
106	Camera Film	1
107	Lensa Kamera	1
108	Servo Zoom Lens	1
109	Layar Film/Projector	36
110	Splitter	11
111	Alat Studio Video Lainnya	2
112	Mesin Jilid	1
113	Handy Talky (HT)	1
114	Facsimile	1
115	Slide Projector (Lapangan)	1
116	Genset	13
117	alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan lainnya	2
118	Blender	1

119	Timbangan/Neraca	1
120	Thermometer	1
121	Lampu Spritus	2
122	Shaker	1
123	Autoclave	1
124	Fumehood	1
125	Generator	4
126	Hammer Mill	2
127	Hot Plate	1
128	Hot Plate Stirer	1
129	Liminar Flow Cabinet	1
130	PH Meter Digital	1
131	Sharp Knife	2
132	Timer Lab.	1
133	Peralatan Ubinan	12
134	alat laboratorium pertanian lainnya	9
135	alat laboratorium kearsipan lainnya	6
136	Gelas Ukur	6
137	Pipet Tetes	5
138	Sppatula Tanduk	2
139	Spatula Stenless Steel	2
140	Uninterrupted Power Supply	30
141	Corong Kaca	1
142	P.C Unit	76
143	Lap top	51
144	Note book	44
145	Monitor	3
146	Printer	98
147	Scanner	16
148	External/ Portable Hardisk	20
149	Peralatan Personal Komputer Lainnya	8
150	Modem	5
151	Peralatan Jaringan lainnya	1

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB di Kabupaten Tanah Laut, sebesar 27.19% pada tahun 2022 pada perhitungan Angka Sangat Sementara BPS, namun kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan distribusi persentase PDRB -0,76%. Hal ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan sawah, serta terjadinya penjualan hasil komoditi pertanian ke daerah luar Kabupaten Tanah Laut dengan harga yang rendah. Penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian. Pada hal sektor pertanian memberikan kontribusi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Laut. Adanya alih fungsi lahan dari komoditas tanaman pangan ke komoditas hortikultura dan perkebunan juga sangat berdampak kepada produksi komoditas pertanian yang dihasilkan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya (Renstra periode 2018 -2023), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3  
Capaian Realisasi Produksi Tahun 2020–2024  
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

No.	Komoditas	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	Ton	289.645	145.890	143.962	147.410	169.270
2	Jagung	Ton	225.084	124.267	122.835	123.060	123.739
3	Cabe	Ton	2.128	2.135,5	2.350,9	2.786,33	2.857,00
4	Bawang Merah	Ton	17,3	36,6	11,00	111,48	120
5	Karet	Ton	6.920,3	14.324,3	14.601,7	19.699,9	21.354
6	Kelapa Sawit	Ton	21.192	49.473,7	50.865,7	73.229,7	75.235

Sumber : Distanhorbun 2025.

#### Analisis Realisasi Capaian Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2020-2024

Berdasarkan data realisasi capaian produksi komoditas pertanian dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan produksi pada setiap komoditas yang dianalisis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan produksi setiap komoditas :

1. **Padi**, Produksi padi mengalami fluktuatif dalam peningkatannya yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 produksi padi sebesar 289.645 ton, hal ini terjadi karena pada tahun 2019 berlangsung program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di Kabupaten Tanah Laut, produksi padi tahun 2021 sebesar 145.890 (penurunan hampir 100%), hal ini terjadi karena pada tahun 2020 ada wabah Covid 19 sehingga keberlanjutan program Serasi tidak dilaksanakan, pada tahun 2022 produksi mencapai 143.962 ton, meningkat menjadi 147.410 ton di tahun 2023, dan melonjak lebih tinggi pada tahun 2024 dengan capaian 169.270 ton. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pertanian, baik dari segi teknologi, penggunaan bibit unggul, maupun peningkatan luas lahan tanam.
2. **Jagung**, Produksi jagung mengalami juga mengalami fluktuatif peningkatan produksinya mulai tahun 2020 hingga 2021, karena pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi wabah Covid 19 yang mempengaruhi kegiatan produksi jagung, dan adanya alih fungsi lahan ke perkebunan terutama sawit yang menyebabkan produksi jagung menurun, tahun 2022 produksi sebesar 122.835 ton, meningkat sedikit menjadi 123.060 ton pada tahun 2023, dan bertambah menjadi 123.739 ton di tahun 2024. Kenaikan ini cukup kecil dibandingkan komoditas lainnya, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan lahan dan faktor iklim.
3. **Cabai**, Produksi cabai menunjukkan tren kenaikan yang positif. Mulai tahun 2020 produksi sebesar 2.128 meningkat menjadi 2.135,5 pada tahun 2021, sedangkan produksi tahun 2022 mencapai 2.350,9 ton, meningkat menjadi 2.786,33 ton di tahun 2023, dan mencapai 2.857,00 ton di tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas lahan dan kemungkinan adopsi teknologi pertanian yang lebih baik.
4. **Bawang Merah**, Komoditas bawang merah mengalami lonjakan produksi yang sangat drastis. Pada tahun 2022, produksi hanya sebesar 11,00 ton, namun meningkat signifikan menjadi 111,48 ton pada tahun 2023, dan mencapai 120 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya ekspansi besar dalam budidaya bawang merah, baik dari segi luas tanam maupun teknik budidaya yang lebih efisien.

5. **Karet**, Produksi karet mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, produksi mencapai 14.601,7 ton, meningkat menjadi 19.699,9 ton pada tahun 2023, dan naik lagi menjadi 21.354 ton pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas kebun karet, kemungkinan dipengaruhi oleh peremajaan tanaman dan pengelolaan kebun yang lebih baik.
6. **Kelapa Sawit**, Produksi kelapa sawit juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, produksi sebesar 50.865,7 ton, naik menjadi 73.229,7 ton di tahun 2023, dan mencapai 75.235 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan luas panen serta perbaikan teknik budidaya dan pengolahan hasil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif dalam produksi komoditas pertanian utama. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain penerapan teknologi pertanian, dukungan kebijakan pemerintah, penggunaan bibit unggul, serta perbaikan sistem irigasi dan manajemen lahan. Namun, untuk komoditas tertentu seperti jagung, peningkatan yang lebih lambat dibandingkan komoditas lain dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait faktor-faktor penghambatnya.

Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas pertanian perlu terus dilakukan guna memastikan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di masa mendatang.

## 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Jenis Produk dan Layanan yang diselenggarakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut meliputi :

Tabel 2.1.4  
Produk dan Layanan

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok Sasaran	Sumber Dana
1	Bidang Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan</li> <li>• Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian</li> <li>• Pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan/hibah saprodi berupa obat-obatan, benih dan bibit</li> <li>• Pinjam pakai alat mesin pertanian (alsintan)</li> <li>• Pelatihan, Pertemuan dan sosialisasi workshop, penyuluhan, sarasehan/diskusi</li> <li>• Pengadaan Alsintan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	APBD II, APBD I, APBN
2	Bidang Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura</li> <li>• Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan/ hibah saprodi berupa obat-obatan, benih, dan bibit</li> <li>• Pinjam pakai alat mesin pertanian (alsintan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	APBD I, APBD II, DAK non Fisik, APBN

3	Bidang Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian organisem pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan</li> <li>• Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan/hibah saprodi berupa obat-obatan benih dan bibit</li> <li>• Pelatihan pertemuan sosialisasi workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	APBD II, APBD I, APBN
4	Bidang Penyuluh & PSP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehabilitasidan pemeliharaan jalan usaha tani (JUT)</li> <li>• Penyusunan standar pelayanan public pemberian rekomendasi usaha pertanian</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian</li> <li>• Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi</li> <li>• Rekomendasi pinjam pakai alsintan</li> <li>• Fasilitasi pupuk bersubsidi</li> <li>• Pemanfaatan pupuk organik</li> <li>• Pemberdayaan/pen gembangan kelompok tani</li> <li>• Peningkatan kulaitas penyuluh pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Tani</li> <li>• Penyuluh Pertanian</li> </ul>	APBD II, APBD I, APBN

Pembangunan lima tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian.

Peningkatan pendapatan petani melalui penguatan dan peningkatan produk dari komoditi pertanian dihadapkan pada beberapa permasalahan serta tantangan yang sangat perlu jadi perhatian stakeholder atau pemangku kebijakan terkait kontribusi pertanian dalam meeningkatkan PDRB kedepannya.

## 1. Tantangan

### a. Lahan

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif. Menyusutnya area lahan pertanian Kabupaten Tanah Laut akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian secara efektif tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun konversi lahan pertanian masih terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut membuat Peraturan Daerah (Perda) LP2B nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai bentuk dalam melindungi lahan pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai amanat UU Nomor 41 tahun 2009. Penurunan tingkat produksi pertanian salah satunya disebabkan kurangnya lahan sawah, dengan maraknya alih fungsi lahan produktif ke sektor pertanian/industri/perkebunan, dan juga disebabkan kemampuan cetak sawah oleh Pemerintah belum sesuai dengan laju konversi lahan sawah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan persoalan masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

Pola tanam serta pengetahuan petani juga mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian mengalami penurunan kualitas bahkan beberapa masuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan pemakaian bahan kimia anorganik yang berlebihan yang berakibat pada struktur tanah menjadi padat dan daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman



menurun. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka kerusakan lahan akan semakin meluas dan berakibat pada penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

#### **b. Infrastruktur**

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat diperlukan adalah sumber air/waduk/bendung berserta dengan jaringan irigasinya. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani, terutama kurang memadainya jaringan irigasi tersier yang sudah banyak rusak.

Prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, dan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

#### **c. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat  
Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani

sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan social.

- Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani yang berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa. Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap menurunnya minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

**d. Pasar Bebas**

Dengan berlakunya Pasar Bebas , semua produk dari dalam dan luar negeri akan bebas keluar masuk Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut merupakan ancaman bagi usaha pertanian yang masih mempunyai produktivitas dan mutu yang rendah, serta masuknya produk dari luar daerah yang berdampak turunnya daya jual produk pertanian daerah, persoalan ini juga ditambah dengan adanya penjualan gabah ke luar daerah dengan harga yang rendah oleh para pembeli.

**e. Tingginya Angka Pertumbuhan Penduduk**

Meningkatnya pertumbuhan penduduk baik dengan kelahiran maupun perpindahan penduduk dari daerah lain akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan yang akan membuat berkurang stock akan bahan pangan tersebut terutama bahan pangan asal padi.

**2. Peluang/Kesempatan**

**a. Pasar**

Permintaan pasar terhadap produk pertanian seperti beras, jagung, kedelai, buah, sayuran dan tanaman perkebunan seperti sawit, karet dan kopi masih cukup besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama pasar local

**b. Dana Penguatan dari Pemerintah dan Perbankan**

Adanya dana penguatan modal dari pemerintah pusat, provinsi serta Kabupaten Tanah Laut, berupa Dana Tugas Pembantuan dan APBD yang dialokasikan untuk penguatan modal usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan peluang besar bagi petani untuk mengembangkan usahanya. Sehingga masalah permodalan yang menjadi kendala utama selama ini diminimalisir. Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang

perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usahatani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplentasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian. Selain itu Pemerintah Pusat melalui dana dekonsentrasi juga menyiapkan dana penguatan modal untuk pengembangan usaha pertanian antara lain berupa bantuan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), kredit PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), KKP (Kredit Ketahanan Pangan), PKP (Peningkatan Ketahanan Pangan Agribisnis), dan lainnya.

**c. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)**

Masih terdapat daerah-daerah yang produktivitas dan mutu hasil pertaniannya masih rendah, namun dapat ditingkatkan produksinya melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air untuk meningkatkan indeks pertanaman dari 1 kali menjadi 2 kali.

**d. Benih Bersertifikat**

Penjaminan Penyediaan benih bersertifikat produksi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

**e. Pengolahan Hasil Pertanian**

Pengembangan iklim usaha pertanian, khususnya penyediaan sarana pasca panen masih dapat terus dikembangkan, mengingat masih kurangnya sarana pasca panen dan usaha pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan analisis kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Tugas dan Fungsinya tersaji dalam tabel 2.2.1 berikut ini.

**Tabel 2.2.1**  
**Rumusan Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah**  
**Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**  
**Kabupaten Tanah Laut.**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar Kawasan berbasis pembangunan yang berkelanjutan.	Potensi Pertanian tumbuh pesat, tetapi kontribusinya masih diperingkat dua	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Hijau	Krisis Pangan melanda dunia (Dinamika geopolitik dan geoekonomi)	Deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas pertanian	Pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan diperkuat melalui interaksi antarwilayah.	Transformasi Ekonomi dengan : Potensi Pertanian dan Perkebunan (Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
	Pertumbuhan ekonomi melambat			Cetak Sawah	Perekonomian masih bergantung pada sektor hulu, sementara hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis	Terbatasnya Infrastruktur Lahan dan Air, seperti : Jaringan Irigasi, Bangunan Air dan Jalan Usaha Tani/Produksi
	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada			Pencapaian swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	Belum maksimal/terbatasnya kemampuan petani dalam menyerap transfer ilmu/teknologi pertanian.	Minat pemuda terhadap pertanian masih rendah

Rumusan akar masalah berdasarkan analisa permasalahan dan permasalahan utama yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis sebagaimana diuraikan seperti di bawah ini :

#### 1. Transformasi Ekonomi Dengan Potensi Pertanian dan Perkebunan

### **(Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).**

Transformasi ekonomi yang dimaksud disini adalah peningkatan produksi pertanian dengan cara penyediaan data dan informasi harga pasar komoditi pertanian, serta informasi supply demand komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat membantu petani dalam menentukan langkah yang tepat dalam hal pemasaran produk pertaniannya. Dengan strategi pemasaran yang tepat tentunya dengan dukungan penyediaan informasi terkait pasar, peningkatan pendapatan petani dapat ditingkatkan, karena petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk memasarkan hasil pertaniannya. Dukungan lembaga keuangan dan perbankan juga diperlukan untuk membantupetani dalam mengembangkan usaha taninya. Pemberian kredit bagi petani serta asuransi usaha tani merupakan instrument yang dapat digunakan petanimelalui fasilitasi dukungan dari pemerintah daerah agar konektivitas antarpetani dan lembaga keuangan dapat terwujud.

#### **2. Belum maksimalnya ketersediaan sarana pendukung produksi mulai dari penggunaan benih bersertifikat, penyaluran pupuk bersubsidi dan penerapan teknologi.**

Faktor utama yang dapat mempengaruhi tercapainya peningkatan produksi adalah penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Penggunaan benih unggul bersertifikat, pemupukan yang memenuhi kaidah tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat dan tepat harga, serta penyediaan sarana teknologi alat dan mesin pertanian mutlak dijamin ketersediaannya oleh pemerintah.

Pemenuhan ketersediaan benih dilakukan melalui produksi benih bersertifikat oleh UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, selain itu pembinaan terhadap penangkar-penangkar benih juga harus terus dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih.

Penyaluran pupuk bersubsidi di masyarakat harus diatur dengan tepat dan dilakukan pengawasan yang ketat. Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, penyediaan alat dan mesin pertanian harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan petani untuk menyediakan alat mesin pertanian sendiri. Namun dalam penyaluran dan

penggunaannya harus tetap diawasi agar dapat berdayaguna sesuai dengan harapan pemerintah daerah.

### **3. Belum maksimal/terbatasnya kemampuan petani dalam menyerap transfer ilmu/teknologi pertanian**

Petani merupakan pelaku utama dalam pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, dengan bantuan Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pembangunan pertanian. Adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi oleh penyuluh kepada petani akan dapat meningkatkan pengetahuan petani dalam mengelola usaha taninya, namun untuk saat ini sebagian besar usia petani di atas 45 tahun, sehingga peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pendidikan dan pelatihan harus dan transfer ilmu dan teknologi pertanian baru kurang optimal.

#### **2.2.1 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis yang berhubungan dengan pembangunan di Pertanian dapat menjadi acuan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Analisa isu- isu strategis merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, maka dapat digambarkan akar masalah dari isu-isu yang dapat mempengaruhi pembangunan pertanian tahun 2025 – 2029 mendatang sebagai berikut :

1. Terbatasnya Infrastruktur Lahan dan Air, seperti : Jaringan Irigasi, Bangunan Air dan Jalan Usaha Tani/Produksi
2. Terjadinya alih fungsi lahan dari sawah ke non pertanian akibat pembangunan sektor non pertanian seperti Perumahan, Industri dan Pembangunan Perkotaan.
3. Penurunan kualitas sumber daya alam pertanian akibat dampak bencana seperti banjir yang rawan terjadi di beberapa daerah.
4. Permintaan terhadap hasil pertanian/pangan organik yang semakin meningkat karena kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

5. Dampak adanya gejala perubahan iklim yang mengakibatkan kondisi cuaca menjadi tidak menentu dan sulit untuk diprediksi.

Dengan membuat/memetakan isu strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, maka kita dapat membuat program/kegiatan yang bisa meintervensi penyebab permasalahan dalam peningkatan produksi pertanian.



# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **3.1.1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka ditetapkan 8/delapan bidang teknis kerja urusan pertanian, dalam menyesuaikan kerja teknis bidang pertanian tersebut ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan yang mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

#### **3.1.2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 disusun dengan kerangka kerja yang sistematis sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut periode 2025-2029 tujuan ke II, yaitu : “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif” dengan sasarannya :

1. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah
2. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana.

### **3.2. Tujuan Renstra 2025-2029**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dan merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena menentukan arah pembangunan pertanian ke depan, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu kebijakan perencanaan pertanian adalah pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun, yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut mengacu pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan Tujuan Renstra 2025-2029 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, dengan fokus pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam kegiatan operasional Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029. Tujuan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 5 tahun adalah

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NPSK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Produksi Pertanian	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN	70,02	72	73	73,05	74	74,05	74,5	
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DTPHortibun Yang Akuntabel	Nilai SAKIP DTPHortibun	80,01	80,01	80,5	82	82,02	82,05	83	
	<b>Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian</b>										
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (ton)								
			Padi	169.270	144.550	168.000	168.500	168.800	170.000	180.000	
			Jagung	123.739	123.305	96.000	96.250	96.350	96.475	100.000	
			Kacang Tanah	134,04	100	110	120	130	140	150	
			Cabe	2.857	2.500,00	2.550,00	2.570,00	2.580,00	2.590,00	2.600,00	
			Bawang	120	50	55	60	60	70	80	
			Durian	50	50	60	70	80	90	100	
			Karet	21.354	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	
			Kelapa Sawit	75.235	54.000	59.000	64.000	69.000	74.000	75.000	
			Kopi	45	48	52	58	62	66	70	

Untuk menghadapi tantangan kedepan dalam rangka mencapai kondisi yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut harus mengembangkan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan perkembangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Strategis merupakan langkah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam manajemen dalam setiap program kegiatannya dalam merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, Strategis akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah

Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategis pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategis dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam menjalankan rencana strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
Persiapan	Penumbuhan	Pengembangan Awal	Pengembangan Akhir	Kemandirian
Kegiatan di Tahun Pertama Dalam Peningkatan Produksi Pertanian fokus pada pangan utama/Pokok yaitu Padi/beras, dengan Sosialisasi kepada Petani/Kelompok Tani tentang Penerapan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Benih Lokal Umur Pendek, Beni Unggul dan Benih Hibrida	Pendampingan Kepada Petani/Kelompok Tani untuk mengganti varietas padinya, dengan cara penanaman percontohan/demplot tanaman padi jenis lokal umur pendek, jenis unggul dan jenis hibrida, dengan target Indeks Pertanaman (IP) 200 minimal 25% dari luas lahan yang dimiliki oleh petani/kelompok tani	Melaksanakan pendampingan kepada petani/kelompok tani untuk menanam padi jenis lokal umur pendek, jenis unggul dan jenis hibrida, minimal 30% di lahan yang dimiliki oleh petani/kelompok tani	Melaksanakan pendampingan kepada petani/kelompok tani untuk menanam padi jenis lokal umur pendek, jenis unggul dan jenis hibrida, minimal 50% di lahan yang dimiliki oleh petani/kelompok tani	Melaksanakan pendampingan kepada petani/kelompok tani untuk menanam padi jenis lokal umur pendek, jenis unggul dan jenis hibrida, minimal 75% di lahan yang dimiliki oleh petani/kelompok tani

**Tabel 3.3.**  
**Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Produksi Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Padi, Jagung, Kacang Tanah, Cabe, Bawang merah, Durian, Karet, Kelapa Sawit dan Kopi

Tabel 3.4.  
Lokus Perangkat Daerah

NO	Wilayah	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Tanah Laut	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian yang baik	
			Penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluh dan Petani	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2029; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Produksi Pertanian	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN	74,6	Nilai SAKIP KABUPATEN		
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DTPHortibun Yang Akuntabel	Nilai SAKIP DTPHortibun	83	Nilai SAKIP DTPHortibun		
			Indek Kepuasan Sekretariat DTPHortibun	90	Indek Kepuasan Sekretariat DTPHortibun	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
			Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	<b>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub KegiatanPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub KegiatanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Pegawai (ASN) yang mendapatkan pembayaran/g aji	130	Jumlah Pegawai (ASN) yang mendapatkan pembayaran/gaji	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	
			Jumlah Dokumen keuangan yang direalisasikan	50	Jumlah Dokumen keuangan yang direalisasikan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan kantor yang di Sediakan	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatn Rumah tangga	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Sub Kegaitan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
			Jumlah Laporan (Buku Tamu)	12	Jumlah Laporan (Buku Tamu)	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Jumlah Dokumen	1	Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Jumlah Dokumen	1	Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	
			Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	180	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	16	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		%		%	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Jumlah produksi padi	180.000	Jumlah produksi padi	1. Padi	
			Jumlah produksi jagung	100.000	Jumlah produksi jagung	2. Jagung	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Produksi Kacang Tanah	150	Jumlah Produksi Kacang Tanah	3. Kacang Tanah	
			Jumlah produksi cabe	2.600,00	Jumlah produksi cabe	4.Cabe	
			Jumlah produksi bawang merah	80	Jumlah produksi bawang merah	5.Bawang Merah	
			Jumlah Produksi Durian	100	Jumlah Produksi Durian	6. Durian	
			Jumlah produksi karet	20.000	Jumlah produksi karet	7. Karet	
			Jumlah produksi kelapa sawit	75.000	Jumlah produksi kelapa sawit	8.Kelapa sawit	
			Jumlah Produksi Kopi	70	Jumlah Produksi Kopi	9. Kopi	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemenuhan sarana pertanian	25	<b>Persentase pemenuhan sarana pertanian</b>	<b>PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	
			Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	25	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan		
			Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	25	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura		
			Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	25	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura		
			Persentase capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian	100	<b>Persentase capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian	100	Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tambahan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	<b>Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tambahan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tambahan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten</b>	
			Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan yang dihasilkan	2	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan yang dihasilkan	Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1	SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Durian	1	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian</b>	<b>75</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian</b>	<b>PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Persentase Pemecahan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>50</b>	Persentase Pemecahan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan	25	Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan		
			Persentase capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	100	<b>Persentase capaian Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan dalam pemenuhan Prasarana Pertanian	1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan dalam pemenuhan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	1	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kp2B dan Lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	1	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Kawasan Pertanian yang bisa dikendalikan dan dimanfaatkan	1	Jumlah Kawasan Pertanian yang bisa dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Pesentase Capaian Pembangu nan Prasarana Pertanian	100	<b>Pesentase Capaian Pembangu nan Prasarana Pertanian</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	
			Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiUsaha Tani	
			Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi	70	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman	100	<b>luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman</b>	<b>PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase capaian Pengendalian dan Penanggula ngan Bencana Pertanian	100	<b>Persentase capaian Pengendalian dan Penanggula ngan Bencana Pertanian</b>	<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggula ngan Bencana Pertanian</b>	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	70	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Jumlah Area Terdampak Perubhan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	1.000	Jumlah Area Terdampak Perubhan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
			Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasi kan		Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	
			persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a		<b>persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			Persentase penyuluh Pertanian yang terlatih	17	<b>Persentase penyuluh Pertanian yang terlatih</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	
			Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	100	<b>Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapaitasnya	11	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapaitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	sub Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

Tabel 4.3  
Rencana, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan

BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BIDANG PERTANIAN URUSAN PILHAN	Nilai SAKIP KABUPATEN	BB	70,02	73	106.623.650.000	73	108.879.971.000	74	95.979.200.000	74	104.542.400.000	75	106.145.400.000
	Nilai SAKIP DTPHortibun	A	80,01	80,5		82		82,02		82,05		83	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Sekretariat DTPHortibun	Nilai	83	87	62.741.650.000	88	49.787.971.000	89	34.304.200.000	90	36.130.400.000	90	36.134.400.000
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	44.000.000	100	48.000.000	100	49.500.000	100	51.000.000	100	55.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	7	22.000.000	7	24.000.000	7	25.000.000	7	26.000.000	7	28.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	4	22.000.000	4	24.000.000	4	24.500.000	4	25.000.000	4	27.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	23.020.000.000	100	23.020.000.000	100	23.020.000.000	100	23.020.000.000	100	23.020.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Jumlah Pegawai (ASN) yang mendapatkan pembayaran/gaji	Orang/Bulan	136	130	23.000.000.000	130	230.000.000	130	23.000.000.000	130	23.000.000.000	130	23.000.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen keuangan yang direalisasikan	Dokumen	42	42	20.000.000	42	20.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	2.260.000.000	100	1.000.000.000	100	2.450.000.000	100	1.288.200.000	100	1.288.200.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	185	180	1.260.000.000	0	-	180	1.350.000.000	180	167.200.000	180	167.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.100.000.000	10	1.121.000.000	10	1.121.000.000

BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	71,4	100	25.298.000.000	100	2.540.356.000	100	2.785.800.000	100	3.065.380.000	100	3.065.380.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	6	1	30.000.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	42.350.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	60	5	500.000.000	2	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	726.000.000
Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	42.350.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	6	2	50.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	72.600.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1	4.000.000	1	4.356.000	1	4.800.000	1	5.280.000	1	5.280.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	3	3	660.000.000	3	726.000.000	3	790.000.000	1	870.000.000	1	870.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan (Buku Tamu)	Laporan	0	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12	900.000.000	12	1.000.000.000	12	1.080.000.000	12	1.188.000.000	12	1.306.800.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	1	5.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	11.512.000.000	100	3.017.800.000	100	4.119.500.000	100	5.230.900.000	100	5.230.900.000

BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	2	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	605.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	60	195	512.000.000	60	217.800.000	60	239.500.000	60	262.900.000	60	262.900.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	21	500.000.000	11	300.000.000	11	330.000.000	11	363.000.000	11	363.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	1	10.000.000.000	1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	66,7	100	2.001.650.000	100	2.021.815.000	100	2.224.000.000	100	2.447.200.000	100	2.447.200.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.650.000	2	1.815.000	2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	12	500.000.000	12	520.000.000	12	572.000.000	12	630.000.000	12	630.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.650.000.000	12	1.815.000.000	12	1.815.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	866.000.000	100	19.140.000.000	100	2.105.400.000	100	2.315.920.000	100	2.315.920.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	31.000.000	2	72.000.000	2	72.000.000	2	79.200.000	2	87.120.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	107	600.000.000	107	600.000.000	107	660.000.000	107	726.000.000	107	726.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	45	50.000.000	45	600.000.000	45	660.000.000	45	726.000.000	45	726.000.000



BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000	2	292.800.000	2	292.800.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	0	1	44.000.000	1	400.000.000	1	440.000.000	1	484.000.000	1	484.000.000
Laju Pertumbu han Sektor Pertanian dan Perikanan	%	%											
Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton											
1. Padi	Jumlah produksi padi	ton	169.270	168.000		168.500		168.800		170.000		180.000	
2.Jagung	Jumlah produksi jagung	ton	123.739	96.000		96.250		96.350		96.475		100.000	
3. Kacang Tanah	Jumlah Produksi Kacang Tanah	ton	134,04	110		120		130		140		150	
4.Cabe	Jumlah produksi cabe	ton	2.857	2.550,00		2.570,00		2.580,00		2.590,00		2.600,00	
5.Bawang Merah	Jumlah produksi bawang merah	ton	120	55		60		60		70		80	
6. Durian	Jumlah Produksi Durian	ton	50	60		70		80		90		100	
7. Karet	Jumlah produksi karet	ton	21.354	19.200		19.400		19.600		19.800		20.000	
8.Kelapa sawit	Jumlah produksi kelapa sawit	ton	75.235	59.000		64.000		69.000		74.000		75.000	
9. Kopi	Jumlah Produksi Kopi	ton	45	52		58		62		66		70	
PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	15	25	4.502.000.000	25	4.752.000.000	30	4.785.000.000	35	5.585.000.000	35	5.844.000.000
	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	15	25		25		30		35		35	
	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	%	15	20		25		30		35		35	
	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	%	15	25		25		30		35		35	
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian	%	100	100	3.452.000.000	100	3.652.000.000	100	3.872.000.000	100	4.259.000.000	100	4.418.000.000

BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	1.452.000.000	1	1.452.000.000	1	1.452.000.000	1	1.597.000.000	1	1.756.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPenduk ung Pertanian	Laporan	1	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	1	2.662.000.000	1	2.662.000.000
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tambahan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten	Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tambahan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	100	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	100	913.000.000	100	1.326.000.000	100	1.426.000.000
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan yang dihasilkan	Ton	0	1 Ton	450.000.000	1	500.000.000	1,5	550.000.000	1,5	600.000.000	2	700.000.000
Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	33.000.000	1	363.000.000	1	363.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Durian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	363.000.000
PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	30	45	33.180.000.000	55	36.800.000.000	65	37.770.000.000	75	41.655.000.000	75	42.775.000.000
	Persentase Pemecahan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	25	35		40		45		50		50	
	Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan	%	5	10		15		20		25		25	
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	100	11.580.000.000	100	12.800.000.000	100	13.770.000.000	100	14.655.000.000	100	14.775.000.000

BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan dalam pemenuhan Prasarana Pertanian	Dokumen	1	1	280.000.000	1	300.000.000	1	320.000.000	1	350.000.000	1	270.000.000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kp2B dan Lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	1	7.700.000.000	1	8.400.000.000	1	8.400.000.000
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Dokumen	1	1	600.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	605.000.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian yang bisa dikendalikan dan dimanfaatkan	Dokumen	0	1	4.700.000.000	1	5.000.000.000	1	5.200.000.000	1	5.300.000.000	1	5.500.000.000
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pesentase Capaian Pengu- nan Prasarana Pertanian	%	100	100	21.600.000.000	100	24.000.000.000	100	24.000.000.000	100	27.000.000.000	100	28.000.000.000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiUsaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	3	600.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	10	2.000.000.000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi	Unit	70	50	20.000.000.000	60	22.000.000.000	60	22.000.000.000	70	24.000.000.000	70	24.000.000.000
PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN	luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman	%	100	100	3.000.000.000	100	14.000.000.000	100	15.200.000.000	100	16.720.000.000	100	16.940.000.000
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian	Persentase capaian Pengendalia n dan Penanggula ngan Bencana Pertanian	%	50	100	3.000.000.000	1.070	14.000.000.000	100	15.200.000.000	100	16.720.000.000	100	16.940.000.000

BIDANG, URUSAN/PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	60	60	1.000.000.000	70	12.000.000.000	70	13.200.000.000	70	14.520.000.000	70	14.520.000.000
Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	Ha	1.000	1.000	2.000.000.000	1.000	2.000.000.000	1.000	2.000.000.000	1.000	2.200.000.000	1.000	2.420.000.000
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	%	100	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	2.600.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000
<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	2.600.000.000	100	3.000.000.000	1	3.000.000.000
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha	Dokumen	100	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	2.600.000.000	100	3.000.000.000	1	3.000.000.000
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase penyuluh Pertanian yang terlatih</b>	%	15,6	100	1.200.000.000	100	1.340.000.000	17	1.320.000.000	17	1.452.000.000	17	1.452.000.000
<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	<b>Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	%	100	100	1.200.000.000	100	1.340.000.000	100	1.320.000.000	100	1.452.000.000	100	1.452.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapaitasnya	Unit	11	11	600.000.000	11	660.000.000	11	660.000.000	11	726.000.000	11	726.000.000
sub Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	0	3	600.000.000	3	680.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726.000.000

Tabel 4.4  
Program Prioritas

NO	PROGAM PRIORITAS	RINCIAN PROGAM	OUTCOME	PROGAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Produksi Padi	Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi	Peningkatan Kesejahteraan Petani (Peningkatan pertumbuhan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Sub Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	
					Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiUsaha Tani	
					Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 di bawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan**  
**dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Tahun 2025 – 2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sakip Kabupaten	Nilai	72	73	73,05	74	74,05	75	
	Nilai Sakip Distanhorbun	Nilai	80,01	80,05	82	82,02	82,05	83	
2	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan								
	Meningkatnya Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton							
		Padi	144.550	168.000	168.500	168.800	170.000	180.000	
		Jagung	123.305	96.000	96.250	96.350	96.475	100.000	
		Kacang Tanah	100	110	120	130	140	150	
		Cabe	2.500,00	2.550,00	2.570,00	2.580,00	2.590,00	2.600,00	
		Bawang Merah	50	55	60	60	70	80	
		Durian	50	60	70	80	90	100	
		Karet	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	
		Kelapa Sawit	54.000	59.000	64.000	69.000	74.000	75.000	
		Kopi	48	52	58	62	66	70	

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan**  
**dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Tahun 2025 – 2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengukur Tingkat Produktivitas Pertanian (Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/Luas Panen x 100%)	%	450	460	470	480	490	500	



Indikator kinerja dan capaian kinerja merupakan harapan dan komitmen Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan produksi pertanian pada komoditas padi, jagung, kacang tanah, bawang merah, cabe, durian karet, sawit dan kopi serta dapat berkontribusi melaksanakan Reformasi Birokrasi terhadap sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi tahun 2025-2029.

Dengan adanya peningkatan produksi dari tahun ketahun tentu akan berpengaruh pada laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah, menurunnya ketimpangan pendapatan antar penduduk serta dapat terpenuhinya swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025- 2029 sangat ditentukan oleh peran serta dan kinerja seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan peran masing-masing serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pembangunan Pertanian di Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dan tidak terlepas dari peran- serta aktif masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator. Keberhasilan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Tujuan, dan Sasaran pengembangan sektor pertanian akan sangat dipengaruhi oleh keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, para petani bersama Pemerintah dan Instansi terkait, serta pihak-pihak lain yang dapat mendukung terwujudnya pertanian yang tangguh, modern dan berdaya saing di Kabupaten Tanah Laut mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan. Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Tanah Laut dengan penuh tanggungjawab.

Seiring dengan keinginan untuk menempatkan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam usaha mempertahankan swasembada dan sebagai lumbung pangan di Kabupaten Tanah Laut, maka penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di sektor pertanian sangat diperlukan, sehingga pertanian yang tangguh, modern dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan di Kabupaten Tanah Laut.

TABEL T-C 23

**PENCAPAIAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	satuan	Target Indikator Lainnya	Target Setiap Tahun				Realisasi Setiap Tahun				Rasio Setiap Tahun					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Produksi Pertanian																
	- Padi (Ton)			231.660	277.959	191.267	150.000	271.941	289.359	145.890	143.962	1,17	1,04	0,76	0,96		
	- Jagung (Ton)			167.090	240.823	110.712	120.000	216.920	225.084	124.267	122.835	1,30	0,93	1,12	1,02	-	
	- Kedelai (Ton)			129.632	693	2.684	72	61	57	32	1.670	0,00	0,08	0,01	23,33		
	- Cabe (Ton)			1.545	1.594	1.645	1.698	1.843,4	2.128,1	2.135,5	2.350,9	1,19	1,34	1,30	1,38		
	- Bawang Merah (Ton)			78,7	79,7	80,7	81,8	71,4	17,3	36,6	11,0	0,91	0,22	0,45	0,13		
	- Karet (Ton)			14.000,0	13.000	13.400	13.500	14.338,2	13.391,9	14.324,3	14.601,7	1,02	1,03	1,07	1,08		
	- Kelapa sawit (Ton)			40.000,0	43.000	45.000	46.000	42.766,3	43.112,2	49.473,7	50.865,7	1,07	1,00	1,10	1,11		
2	Persentase Produksi Hasil Pertanian yang dipasarkan			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
3	Persentase Komoditas Unggulan Perkebunan yang diterima perusahaan pengolahan																
	- Kelapa Sawit			100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
	- Karet			100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
4	Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
5	Sasaran Strategis Bidang Tanaman Pangan																
	Persentase Luas Tanam Tanaman Pangan																
	-Padi			58.500	65.000	55.750	60.037	64.288	57.315	48.435	36.639	1,10	0,88	0,87	0,61		
	-Jagung			27.500	39.006	23.596	26.530	35.280	27.050	20.740	20.740	1,28	0,69	0,88	0,78		
	-Kedelai			5.500	503	2.000	51	124	51	9	2.326	0,02	0,10	0,00	45,61		
	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan																
	-Padi			56.160	62.400	53.620	58.282	55.714	62.790	32.463	28.882	0,99	1,01	0,61	0,50		
	-Jagung			26.950	38.226	21.415	25.180	36.020	29.931	19.894	20.014	1,34	0,78	0,93	0,79		
	-Kedelai			9.097	478	1.917	49	51	31	24	1.343	0,01	0,06	0,01	27,20		
	Persentase Produksi Hasil Tanam Tanaman Pangan																
	- Padi (Ton)			231.660	277.959	191.267	150.000	271.941	289.359	145.890	143.962	1,17	1,04	0,76	0,96		
	- Jagung (Ton)			167.090	240.823	110.712	120.000	216.920	225.084	124.267	122.835	1,30	0,93	1,12	1,02		
	- Kedelai (Ton)			129.632	693	2.684	72	61	57	32	1.670	0,00	0,08	0,01	23,33		
	Persentase Produk Hasil Tanam Tanaman Pangan yang di Pasarkan																
	-Padi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Jagung			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kedelai			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase Teknologi Tepat Guna yang di Terapkan																
	-Padi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Jagung			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kedelai			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	Sasaran Strategis Bidang Hortikultura																
	Persentase Luas Tanam Tanaman Hortikultura																
	-Cabe (Ha)			156	274	275	180	156	232	275,25	199,5	1,00	0,85	1,00	1,11		
	-Bawang Merah (Ha)			29	40	40	4	29	6	13,95	4	1,00	0,15	0,35	1,00		

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	satuan	Target Indikator Lainnya	Target Setiap Tahun				Realisasi Setiap Tahun				Rasio Setiap Tahun					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	
	-Tanaman Hias			1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Semangka (Ha)			105	154,28	158,92	80	105	127	89,50	86,25	1,00	0,82	0,56	1,08		
	<b>Persentase Luas Panen Tanaman Hortikultura</b>																
	- Cabe (Ha)			260	232	253	250	260	497	324	256,25	1,00	2,14	1,28	1,03		
	- Bawang Merah (Ha)			25,0	6	8	2,0	25	11	11,85	2,0	1,00	1,83	1,48	1,00		
	-Tanaman Hias			1	-	-	1	1	-	1	1	1,00					
	-Semangka (Ha)			110	127	89,50	90	110	110	85,50	93,75	1,00	0,87	0,96	1,04		
	<b>Persentase Produksi Hasil Tanaman Hortikultura yang di Pasarkan</b>																
	- Cabe (Ton)			1.545	1.594	1.645	1.698	1.843,4	2.128,1	2.135,5	2.350,9	1,19	1,34	1,30	1,38		
	- Bawang Merah (Ton)			78,7	79,7	80,7	81,8	71,4	17,3	36,6	11,0	0,91	0,22	0,45	0,13		
	-Tanaman Hias			1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Semangka			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
7	<b>Sasaran Strategis Bidang Perkebunan</b>																
	<b>Persentase Luas Tanam Tanaman Perkebunan</b>																
	-Karet			14.500	15.000	15.500	15.900	14.996	15.226	15.891	16.015	1,03	1,02	1,03	1,01		
	-Sawit			11.000	12.000	12.000	12.500	11.916	11.916	12.460	12.634	1,08	0,99	1,04	1,01		
	-Kopi			100	130	140	140	120	130	138	144	1,20	1,00	0,99	1,03		
	<b>Persentase Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan</b>																
	-Karet			14.000,0	13.000	13.400	13.500	14.338,2	13.391,9	14.324,3	14.601,7	1,02	1,03	1,07	1,08		
	-Sawit			40.000,0	43.000	45.000	46.000	42.766,3	43.112,2	49.473,7	50.865,7	1,07	1,00	1,10	1,11		
	-Kopi			100	140	145	150	103	146	149	157	1,03	1,04	1,02	1,05		
	<b>Persentase Produksi Hasil Tanaman Perkebunan yang di Pasarkan</b>																
	-Karet			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Sawit			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kopi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	<b>Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan</b>																
	-Karet			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Sawit			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	-Kopi			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
8	<b>Sasaran Strategis Bidang PSP &amp; Penyuluh</b>																
	Persentase SDM penyuluh yang bersertifikat profesi			11	-	2	-	11	-	1	-	1,00		0,50			
	Persentase kelompok tani yang terampil			1.650	1.650	1.700	1.700	1.650	1.155	1.120	1.700	1,00	0,70	0,66	1,00		
	Persentase alsintan sesuai yang dapat dimanfaatkan			170	170	180	175	170	170	180	175	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase kelompok tani yang mendapat pupuk bersubsidi			16.500	16.750	15.695	15.000	16.500	16.750	15.695	15.000	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan			23	10	12	46	23	10	12	46	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentasi jalan produksi yang dapat dimanfaatkan			13	7	7	24	13	7	7	24	1,00	1,00	1,00	1,00		
9	<b>Sasaran Strategis Eselon III Sekretaris</b>																
	Nilai RB			E	E	BE	E	E	C	BE	BE						
	Nilai SAKIP			E	E	BE	E	E	BE	E	E						
	Persentase terkelolanya administrasi umum kepegawaian yang baik dan tepat waktu			100	100	100	100	100	97	95	95	1,00	0,97	0,95	0,95		
	Persentase terkelolanya administrasi perencanaan yang baik dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	90	90	1,00	1,00	0,90	0,90		
	Persentase terkelolanya administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan			100	100	100	100	100	100	90	90	1,00	1,00	0,90	0,90		

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA DAERAH	41.903.161.072	44.762.113.020	38.644.543.591	42.763.638.991		36.060.246.071	25.456.492.440	29.768.341.861	39.336.391.620		0,86	0,57	0,77	0,92			
Belanja Operasi	23.847.801.160	35.470.278.407	23.472.891.768	23.920.647.200		19.606.983.234	17.744.555.545	19.195.457.072	21.686.446.680		0,82	0,50	0,82	0,91			
- Belanja pegawai	23.847.801.160	35.470.278.407	23.472.891.768	23.920.647.200		19.606.983.234	17.744.555.545	19.195.457.072	21.686.446.680		0,82	0,50	0,82	0,91			
Belanja langsung/modal	18.055.359.912	9.291.834.613	15.171.651.823	18.842.991.791		16.453.262.837	7.711.936.895	10.572.884.789	17.649.944.940		0,91	0,83	0,70	0,94			
- Belanja pegawai	56.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
- Belanja barang dan jasa	7.838.115.912	5.197.265.113	8.135.125.909	4.033.488.142		7.053.328.568	3.702.260.565	3.702.260.566	3.801.056.388		0,90	0,71	0,46	0,94			
- Belanja modal	10.160.894.000	4.094.569.500	7.036.525.914	14.809.503.649		9.399.934.269	4.009.676.330	6.870.624.223	13.848.888.552		0,92	0,96	0,96	0,94			

Tabel T-C 25

## Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)	2026 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		NILAI SAKIB KABUPATEN	B	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya Kinerja tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	BB	80,01	82,00	83,00	85,00
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan					
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan					
			1. Padi	143.962	144.100	144.300	144.550	144.850
			2.Jagung	122.835	122.982	123.136	123.305	123.495
			3.Cabe	2.350,90	2.360,10	2.370,10	2.380,90	2.392,80
			4.Bawang Merah	11,00	11,11	11,23	11,36	11,51
			5.Karet	14.601,70	14.887,30	15.182,30	15.486,10	15.800,20
			6.Kelapa sawit	50.865,70	51.730,42	52.920,21	54.437,37	56.109,80



Tabel T-C 26

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN			SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di SKPD	1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
						2	Melaksanakan admnistrasi keuangan perangkat daerah
						3	Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
						4	Melaksanakan admnistrasi kepegawaian perangkat daerah
						5	Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah
						6	Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
						7	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
						8	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Meningkatkan produksi pertanian	1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian yang baik	1	Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
						2	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
						3	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan SDG /tanaman
						4	Peningkatan dan penyebaran benih bermutu bersertifikat
				2	Diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian
						2	Penanganan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
				3	Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi	1	Menumbuh kembangkan kooporasi pertanian.
						2	Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluh
						3	Peningkatan SDM Penyuluh dan Petani

TABEL T-C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN T ANAH LAUT																			
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DAT A CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP KABUPATEN	B	69,00		69,00		70,01		75,00		80,01		80,01		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DTPHortibun Yang Akuntabel		Nilai SAKIP DTPHortibun	BB	80,01				82		83		85		95		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indek Kepuasan Sekretariat DTPHortibun	Nilai			85		90		90		95				DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	8.000.000	7	9.984.134	2	20.000.000	3	22.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	3.440.000	4	9.939.734	5	20.000.000	5	22.000.000	5	24.000.000	5	24.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	23.920.647.200	148	26.001.065.845	136	26.001.065.845	136	28.601.172.430	136	31.461.289.672	136	31461289672	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	3.440.000	5	9.995.796	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	24200000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	136	152.000.000	0	-	136	167.200.000	136	167.200.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	10	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	10	121.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	71,4		85,7		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	6	13.205.864	1	13.179.191	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	24.200.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	60	143.895.207	1	93.209.655	5	500.000.000	5	550.000.000	2	605.000.000	2	605.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	-	1	19.210.963	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	24.200.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	6	49.349.506	1	44.300.580	2	50.000.000	2	55.000.000	1	60.500.000	1	60.500.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	23.462.400	2	3.600.000	1	3.600.000	1	3.960.000	1	4.356.000	1	4.356.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	200.990.000	1	668.500.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	1.080.000.000	12	1.080.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DAT A CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0		0	0	100		100		75		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	-	0		2	900.000.000	2	990.000.000	1	500.000.000	5	2.390.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-	0		60	180.000.000	60	198.000.000	60	217.800.000	180	595.800.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	-	0		5	25.000.000	11	66.000.000	0	-	16	91.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-			3	6.700.000.000	3	7.370.000.000	1	1.000.000.000	7	15.070.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	66,7		66,7		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	1	1.815.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	248.435.392	4	261.292.170	3	252.500.000	3	277.750.000	3	305.525.000	3	305.525.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.212.565.463	12	1.098.778.989	12	1.246.000.000	12	1.370.600.000	12	1.507.660.000	12	1.507.660.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	60		60		100		100		100				DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25.000.000	1	25.500.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	42.350.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	107	145.000.000	107	451.500.000	22	236.200.000	22	259.820.000	22	285.802.000	22	285.802.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	19.600.000	22	15.850.000	25	25.000.000	25	27.500.000	30	35.000.000	30	35.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	0		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	242.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	0	-	0	0	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	48.400.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			kegiatan BPP 11 kecamatan x 50.000.000		jumlah pertemuan															
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0		0		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang di Sediakan	Paket	0	-	0		1	22.000.000	1	24.200.000	1	28.000.000	1	28.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Paket	0	-	0		22	33.000.000	11	36.300.000	11	39.930.000	11	43.923.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Peralatn Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	-	1	19.210.963	11	22.000.000	11	24.200.000	11	28.000.000	11	28.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DAT A CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	0	-	0		2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0		2	19.200.000	2	21.780.000	2	23.958.000	2	26.353.800	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	0		12	387.200.000	121	425.920.000	12	468.512.000	12	515.363.200	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	-	0		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	-	0		89	178.000.000	89	195.800.000	89	215.380.000	89	215.380.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	-	0		22	22.000.000	22	24.200.000	22	26.620.000	22	26.620.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	%	%													DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	ton	334.626,30		336.070,93		337.919,84		340.170,73		326.859,11		356.892,59		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			1. Padi	Jumlah produksi padi	ton	143.962		144.100		144.300		144.550		144.850		160.000		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			2.Jagung	Jumlah produksi jagung	ton	122.835		122.982		123.136		123.305		123.495		123.536		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			3.Cabe	Jumlah produksi cabe	ton	2.350,90		2.360,10		2.370,10		2.380,90		2.392,80		2.542,19		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			4.Bawang Merah	Jumlah produksi bawang merah	ton	11,00		11,11		11,23		11,36		11,51		8,40		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			5.Karet	Jumlah produksi karet	ton	14.601,70		14.887,30		15.182,30		15.486,10		15.800,20		15.315,20		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			6.Kelapa sawit	Jumlah produksi kelapa sawit	ton	50.865,70		51.730,42		52.920,21		54.437,37		56.109,80		55.490,80		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut
				Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	%	Na		10		15		20		25		25		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian	%	100		50		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	900.000.000	0	0	1	1.200.000.000	1	1.320.000.000	1	1.452.000.000	1	1.452.000.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	250.406.981	3	444.845.087	1	750.000.000	1	825.000.000	1	907.500.000	1	907.500.000	DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0		50		100		100		100		100		DTPHortib un	Kab. Tanah Laut	

TUJUAN		SASARAN	PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DAT A CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA		UNIT KERJA PERANG	LOKASI	ket
						2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	0		1	27.860.221	1	76.000.000	1	83.600.000	1	100.320.000	1	100.320.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Durian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	0		0		1	120.000.000	1	132.000.000	1	158.400.000	1	158.400.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	na		na		30		45		60		60		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura	%	na		na		25		35		45		45		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan	%	na		na		5		10		15		15		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	%	0		0		100		100		100		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kp2B dan Lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	0		0		1	1.247.500.000	1	1.372.250.000	1	1.509.475.000	1	1.509.475.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Peta Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	0		1	99.733.500	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	133.100.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pesentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian	%	0		0		100		100		100		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Unit	0		0		3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726000000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Unit	0		0		3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	726000000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Unit	70	13.768.273.893	42	8.998.138.368	28	5.600.000.000	30	6.160.000.000	35	6.776.000.000	35	6776000000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman pertanian	%	100		100		100		100		100		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	50		50		100		100		100		100		DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	
			Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	30	124.952.145	45	276.159.903	60	550.000.000	60	605.000.000	70	665.500.000	84	544.500.000	DTPHor tib un	Kab. Tanah Laut	

[illegible]

Tabel T-C 28

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NILAI SAKIB KABUPATEN	Dokumen/Nilai	B	69,00	70,01	75,00	80,01	
	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	Dokumen/Nilai	BB	80,01	82,00	83,00	85,00	
2	Produksi Hasil Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan							
	1. Padi	Ton	143.962	144.100	144.300	144.550	144.850	
	2. Jagung	Ton	122.835	122.982	123.136	123.305	123.495	
	3. Cabe	Ton	2350,90	2360,10	2370,10	2380,90	2392,80	
	4. Bawang Merah	Ton	11,00	11,11	11,23	11,36	11,51	
	5. Karet	Ton	14.601,70	14.887,30	15.182,30	15.486,10	15.800,20	
	6. Kelapa Sawit	Ton	50865,70	51730,42	52920,21	54437,37	56109,80	